

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad, Ma'shum. 2009, *Politik Kekuasaan Kehakiman Pasca Amndemen Undang-Undang Dasar 1945*, Total Media, Yogyakarta.
- Ali, Ahmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta.
- Ali, Zainudin, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anderson, Gary dan Kathryn G. Herr, 2007, *Encyclopedia of Activism and Social Justice*, SAGE Publication, California.
- Asshiddiqie, Jimly, 2005, *Hukum Acara Pengujian Undang-undang*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Ashhiddiqie, Jimly, 2010, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bachtiar, 2021, *Mendesain Penelitian Hukum*, Deepublish, Yogyakarta.
- Bahar, Saafrodin, 1995, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 22 Mei 1945-22 Agustus 1945*, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta.
- Subechi, Imam, 2012, *Judicial Review: Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barak, Aharon, 2006, *Judge In Democracy*, Oxford, Princeton.
- Barendt, Erick, 1998, *An Introduction to Constitutional Law*, Great Britain Biddles Ltd, Guildford and King's Lynn.
- Bruggink, 1999, *Refleksi Tentang Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Dahlman, Christian dan Eveline Feteris, 2013, *Introduction," in Legal Argumentation Theory: Cross-Disciplinary Perspectives*, Springer, New York.
- Diantha, I Made Pasek. 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.

- Fatmawati, 2005, *Hak Menguji (Toetsings Recht) yang Dimiliki Hakim dalam Sistem Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Garner, Bryan A, 2009, *Black's Law Dictionary*, Thomson Reuters, United States of America.
- Hartono, Hadisoeparto, 1993, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Holland, Kenneth, 1991, *Judicial Activism in Comparative Perspective*, Macmilan, London.
- Huda, Ni'matul dan Nazariyah, 2011, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Nusa Media, Bandung.
- Indonesia, Republik, 2009, *Konstitusi Indonesia, UUD 1945 dan Amandemen I, II, III dan IV*, Pustaka Timur, Yogyakarta.
- Ishaq, H, 2027, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung.
- Isra, Saldi, 2010, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Kartono, 2021, *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Undang-Undang*, SIP Publishing, Depok.
- Kelsen, Hans, 1949, *General Theory of Law and State*, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts.
- Kelsen, Hans, 2007, *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Alih Bahasa: Somardi, BEE Media Indonesia, Jakarta.
- Latief, Abdul, 2009, *Fungsi Mahkamah Konstitusi: Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokras*. Total Media, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Mulia, Jakarta.
- Manan, Bagir, 2003, *Teori Politik dan Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta.
- MD, Moh. Mahfud, 2010, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Rajawali Pers, Jakarta.

- MD, Moh. Mafud. 2020, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok.
- Mertokusumo, Sudikno dan A.Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mochtar, Zainal Arifin, 2022, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*, Buku Mojok, Yogyakarta.
- Peczenik, Alexander, 2009, *on Law and Reason*, Springer, New York.
- Prihatmoko, Joko, 2005, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung: Filosofi, Sistem, dan Problema Penerapan di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2013, *Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto dan Ronny Hanintjo Soemitro, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum, Buku Materi Pokok Modul 1-5*, Karunia, Jakarta, Universitas Terbuka.
- Scheb, John dan Otis H. Stephens, 2008, *American Constitutional Law Volume I: Source of Power and Restraint*, Thomson Wadsworth, Belmont.
- Soebechi, Imam, 2016, *Hak Uji Materiil*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soemantri, Sri, 1997, *Hak Uji Material di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Sudirman, Antonius, 2007, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar*, Citra Aditya, Bandung.
- Stephens Jr, Otis dan John M. Scheb, 2008, *American Constitutional Law Volume I: Source of Power and Restraint*, Thomson Wadsworth, Belmont.
- Suharizal, 2012, *Pilkada, Regulasi, Dinamika dan Konsep Mendatang*, Rajawali, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

The Encyclopedia Americana Vol.16, Cet.7, 1977, Grolier Limited, Canada.

B. Jurnal

Aprilia, Vina, Anisah Pulungan, Reni Silalahi, Fadilah Putri, Mitha Manurung dan Sri Hadiningrum, "Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah secara Demokratis dan Serentak Tahun 2024", *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Hukum* Vol.1, No.2, 2003.

Aziz, Mahmud. "Aspek-Aspek Konstitusional Pembentukan Peraturan Perundang-undangan" *Jurnal Konstitusi* Volume 3, 3 September 2006

Canon, Bradly "Defining the Dimensions of Judicial Activism", *Judicature* Vol.66, No.6, 1983.

Faiz, Pan Mohamad, "Dimensi *Judicial Activism* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi* Vol.13, No. 2, 2016.

Frimansyah, Adithya Tri, "Refleksi Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024: Eskalasi Yudisialisasi Politik dan Politisasi Yudisial dalam Pengujian Norma", *ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tata Sosial*, Vol.3, No.2, 2024.

Erlangga, Galih dan Dian Agung Wicaksono, "Implikasi Putusan Pengujian Undang Terhadap Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Pada Mahkamah Agung", *Jurnal Yudisial*, Vol.9, No.2, 2016.

Hasibuan, Lawali dan Alvin Hamzah, "Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki", *Jurnal Legisla* Vol.15, No.2, 2023

Heydon, Dyson, "Conservatism and the Seven Sins of Judicial Activism", *University of Colorado Law Review* Vol.73, No.4, 2002.

Hidayat, Arif Penemuan Hukum melalui Penafsiran Hakim dalam Putusan Pengadilan, *Jurnal Pandecta*, Vol. 8, No. 2, 2013.

Jones, Greg, "Judicial Activism and the Death of the Rule of Law", *Otago Law Review* Vol.15, No.1, 2001.

Lailam, Tanto, "Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21, No. 1, 2014.

Lathif, Nazaruddin, “Teori Hukum sebagai Sarana/Alat untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat”, *Pakuan Law Review*, Vol.3, No.1, 2017.

Kmiec, Keenan, “The Origin and Current Meanings of ‘Judicial Activism’”, *California Law Review*, Vol.92, No.5

Kurniawan, Anfal, “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 Tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah”, *Semarang Law Review* Vol.5, No.2, 2024

Manan, Bagir, “Beberapa Catatan tentang Penafsiran”, *Varia Peradilan*, Tahun Vol.24, No. 285, 2009

Marshall, William, “Conservatives and the Seven Sins of Judicial Activism”, *University of Colorado Review* Vol.73, No.4, 2002.

Setiadi, Wicipto, “Pembangunan Hukum Dalam Rangka Peningkatan Supremasi Hukum”, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol.1, No.1, 2012.

Sunardi, Dian, “Kontradiksi Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol.16, No.2, 2022.

Talmadge, Phillip, “Understanding the Limits of Power: Judicial Restraint in General Jurisdiction Court Systems”, *Seattle University Law Review*, No, 695, 1999.

Wibowo, Mardian “Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang” *Jurnal Konstitusi*, Vol.12, No.2, 2015

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesudah Amandemen).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 980)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1211)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 876)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 60)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 91)

D. Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 15/PUU-V/2007 perihal Pengujian Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 58/PUU-Xvii/2019 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Yang Diubah Terakhir Kali Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Terhadap Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Putusan Mahakamah Konstitusi Repulik Indonesia Nomor 70/PUU-XXII/2024 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 23 P/HUM/2024 perihal pengujian Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

E. Skripsi, Tesis, dan Disertasi

Arizona, Yance. 2007. Penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 33 UUD 1945: Perbandingan Putusan Pengujian UU No. 20/2002 tentang Ketenagalistrikan dengan Putusan Pengujian UU No. 7/2004 tentang Sumberdaya Air, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.

Jumadil. 2020. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.58/PUU-XVII/2019 Tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah Ditinjau Berdasarkan Fiqh Siyasah, *Skripsi*, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusalam, Aceh, 2020.

Muhtadi, Amar. Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Syarat Usia Pencalonan Kepala Daerah Sebagai Pejabat Publik, *Skripsi*, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2024.

F. Makalah/Pidato

Jimly Asshidiqie, “Gagasan Negara Hukum Indonesia”, Makalah disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 22-24 November 2011

Saldi Isra, “Titik Singgung Wewenang Mahkamah Agung Dengan Mahkamah Konstitusi”, Makalah, disampaikan dalam Seminar “Titik Singgung Wewenang antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi”, Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, Jakarta, 13 November 2014

G. Internet

Adrial Akbar, “Tito Usul Pelantikan Kepala Daerah Dilakukan Bertahap, Dimulai 1 Januari 2025” <https://news.detik.com/pemilu/d-7428876/tito-usul-pelantikan-kepala-daerah-dilakukan-bertahap-dimulai-1-januari-2025>, diakses pada Agustus 2024

Hukum online, “Pakar HTN Bedah Akar Masalah Putusan MA Soal Syarat Usia Kepala Daerah”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pakar-htn-bedah-akar-masalah-putusan-ma-soal-syarat-usia-kepala-daerah-lt666c39f6d2771/?page=3>, diakses pada 28 Agustus 2024.

Kompas.com, “Soal Putusan MA, Pakar: Pertimbangan Hukum Hakim Sangat Dangkal”, <https://nasional.kompas.com/read/2024/05/31/09181421/soal-putusan-ma-pakar-pertimbangan-hukum-hakim-sangat-dangkal?page=all>, diakses pada 28 Agustus 2024

.Pusat Studi Hukum Kebijakan, “Mahkamah Agung “Melegalkan” Dinasti Politik Jokowi-Prabowo”, <https://pshk.or.id/publikasi/mahkamah-agung-melegalkan-dinasti-politik-jokowi-prabowo/>, diakses pada 31 Juli 2024.

Yuliandri, “Bisakah Pertimbangan Hakim MK yang Dissenting Opinion
Dijadikan Rujukan Hukum?”,
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-pertimbangan-hakim-mk-yang-dissenting-opinion-dijadikan-rujukan-hukum-lt5bfc911a3607/#>!, diakses pada 27 Agustus 2024.